

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sudah mulai membaik hal ini bisa dilihat dari banyaknya pembangunan yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Pada hakikatnya pembangunan harus bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada pembangunan jangka menengah Nasional. Pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan berkiplat pada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memperbaiki taraf hidup serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Untuk bisa memenuhi tujuan tersebut maka pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Pemerataan pembangunan ini menitikberatkan pada kebutuhan krusial masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan dan industri. Beberapa proyek mega industri yang telah dilakukan yaitu, pembangunan jalan raya, pabrik-pabrik, jalan tol, bendungan, serta bandara. Dari sekian banyaknya pembangunan mega industri yang dilakukan akan berbanding lurus dengan jumlah lahan yang dibutuhkan.

Pembangunan diselaraskan dengan kemajuan dan kemakmuran, akan tetapi pada kenyataannya perencanaan pembangunan yang dilakukan akan selalu menjurus kepada timbulnya beberapa permasalahan. Permasalahan yang hadir dari suatu pembangunan di antaranya terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat serta adanya konflik. Permasalahan-permasalahan tersebut jamak ditemukan dalam setiap pembangunan yang telah dilakukan. Beberapa contoh permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan adalah terjadinya konflik pada saat pembangunan bendungan di Jatigede Sumedang dan pembangunan bandara di Kulon Progo. Permasalahan tersebut terulang pada pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang sekarang sedang dalam proses. Harapan dari dilakukannya pembangunan bertolak belakang dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan.

Pembangunan bandara merupakan salah satu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bandara Internasional Jawa Barat adalah bagian dari beberapa proyek mega industri yang akan segera diselesaikan menyusul Bendungan Jatigede dan Tol Cipali yang sudah lama rampung. Permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan tidak jauh dari adanya kebutuhan lahan yang akan dipergunakan dan nyatanya pembangunan mega industri ini memerlukan banyak sekali lahan, hal ini menjadikan pemerintah mau tidak mau harus melakukan alih fungsi lahan sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini dapat terealisasikan.

Pada prosesnya pembangunan akan melibatkan dua aspek, yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial. Aspek lingkungan menyatakan bahwa di setiap pembangunan pasti membutuhkan lahan yang akan dipergunakan, sehingga pemerintah harus melakukan pembebasan lahan. Lahan yang dipergunakan mencakup pada lahan pertanian, dan perumahan warga setempat. Proses pembebasan lahan adalah penyerahan hak secara hukum antara pemegang hak atas tanah dengan penguasa (pemerintah atau pengusaha) dengan cara pemberian uang ganti rugi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.15 Tahun 1975, *Tentang Pembebasan Tanah*) bahwa pembebasan tanah atau lahan ialah “melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi”. Aspek sosial berhubungan dengan masyarakat sehingga pemerintah harus melakukan suatu administrasi proses pembebasan lahan, seperti pemberian ganti rugi karena lingkungan tempat tinggal masyarakat dipakai untuk pembangunan.

Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi pada daerah perkotaan saja, akan tetapi juga pada daerah pedesaan. Alih lahan biasanya terjadi pada lahan pertanian dan pemukiman. Adanya alih fungsi lahan ini memberikan dampak pada masyarakat di sekitar pembangunan. Salah satu contoh adanya alih fungsi lahan yang kini tengah dilakukan adalah pada pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Akan tetapi, dari adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan bandara ini telah menimbulkan konflik. Bandar udara yang terletak di Majalengka ini dibangun untuk melayani daerah disekitar Cirebon. Kawasan dengan konsep

aerotropolis ini di bangun di daerah persawahan dan pedesaan. Jika ditotalakan pembangunan ini memerlukan kurang lebih 5. 000 hektar dengan pembangunan bandara seluas 1.800 hektar dan *aerocity* seluas 3.490 hektar. Pembangunan bandara dinilai memerlukan waktu yang begitu lama mengingat awal dimulainya yaitu pada tahun 2011 yang kemudian dijanjikan akan mulai beroperasi pada tahun 2016, akan tetapi mundur lagi menjadi tahun 2017, dan sekarang sedang diproses lebih cepat untuk bisa dibuka pada tahun 2018.

Sebelum berlangsungnya pembangunan, ada beberapa daerah yang menjadi pilihan untuk pembangunan, yaitu Subang, Kuningan, dan Majalengka. Akan tetapi, Majalengka menjadi daerah terpilih untuk pembangunan. Pembangunan bandara di Majalengka memakai salah satu wilayah di Kecamatan Kertajati. Majalengka khususnya Kecamatan Kertajati dipilih untuk pembangunan bandara karena sudah memenuhi kriteria dari segi lahan dan penduduknya belum terlampau padat. Pemilihan wilayah di Majalengka juga menitikberatkan kepada perhitungan masalah biaya, mengingatkan bahwa postur tanah di daerah Majalengka adalah datar, tidak seperti daerah lain yang postur tanahnya berupa pegunungan, sehingga alasan ini menjadi pendukung bahwa Majalengka dipilih menjadi daerah untuk pembangunan bandara. Selain itu, alasan lain pemilihan Kabupaten Majalengka untuk pembangunan bandara adalah karena lokasinya strategis dan masih banyak lahan pertanian. Hal ini karena Majalengka tidak seperti kanidat kota lain yang sudah banyak bangunan, baik itu perumahan atau pabrik, serta berdasarkan hasil kajian dari pihak Angkasa Pura bahwa garis lintas di udara sudah memenuhi kriteria jalur penerbangan (arah mata angin).

Awal tahun 2010 rencana pemerintah provinsi akan membangun bandara penyangga Bandara Soekarno Hatta karena terlalu padatnya jumlah penerbangan. Kemudian pemerintah membentuk tim pengadaan tanah bandara yang lokasinya di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2011 dimulainya tahap survey lokasi oleh Kemenhub dan Dishub Provinsi. Selanjutnya membentuk nama tim dan nama bakal bandara dengan nama Bandara Internasional Jawa Barat yang disingkat menjadi BIJB dan tahap pengerjaan oleh *maincont* PT. Adi Karya, PT Waskita, dan PT Wika.

Kecamatan Kertajati merupakan salah satu kecamatan yang ada di Majalengka. Ada beberapa desa di daerah Kecamatan Kertajati yang wilayahnya dipakai untuk pembangunan bandara, yaitu Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Bantarjati, Desa Sukakerta, dan Desa Sukamulya. Dari kelima Desa ini, sudah empat desa yang lolos dalam pembayaran alih fungsi lahan, yang tersisa hanya Desa Sukamulya yang sampai sekarang pembebasan lahan masih dalam tahap negosiasi. Pembebasan lahan di Desa Sukamulya berlangsung alot karena masyarakat tetap bersikukuh atas tanah kepemilikan. Desa Sukamulya terdiri dari satu dusun bernama Sukaresmi, dan untuk selebihnya ada blok-blok dan dinamai Blok Senin sampai Sabtu untuk pemukiman, dan untuk wilayah persawahan bernama Bilang Kramat dan Gempol. Seluruh wilayah ini belum sepenuhnya mendapatkan UGR (Uang Ganti Rugi). Hal ini dikarenakan belum adanya kecocokan harga yang diinginkan oleh masyarakat. Dari enam blok yang ada di Desa Sukamulya, baru dua blok yang lahannya dibebaskan, yaitu Blok Jumat dan Blok Sabtu. Dalam pembebasan lahan ini belum ada sosialisasi dari pihak terkait langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan hanya kepada beberapa pihak saja, yang menjadi perwakilan masing-masing Desa yang diwakili oleh kepala Desa. Kepala desa yang diundang langsung menyetujui tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat, sedangkan untuk sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat belum dilakukan.

Proses terhambatnya penyelesaian pembangunan bandara ini tidak terlepas dari terjadinya konflik di salah satu wilayah, yaitu di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang terus memberikan penolakan terhadap pembangunan BIJB. Penolakan-penolakan ini kian memanas yang kemudian menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi disebabkan belum mencapai kata mufakat dari proses pembebasan lahan. Harga yang diberikan untuk penggantian lahan dinilai kurang memadai, mengingat Desa Sukamulya merupakan desa dengan lahan paling produktif yang mampu mencapai musim tanam hingga tiga kali. Masyarakat menginginkan transparansi harga beli tanah milik mereka. Selain itu, untuk bisa mengetahui harga tanah, mereka harus menyerahkan dulu surat tanah mereka kepada pihak terkait, dan pemberian hargapun tidak sama antara satu warga

dengan warga lain. Untuk tanah yang berada di dekat jalan utama bisa mendapatkan Rp. 5.000.000 perbata, akan tetapi untuk tanah yang berada di kawasan dalam hanya dihargai sebesar Rp. 2.000.000 atau Rp. 3.000.000. Untuk lahan persawahan diberi harga sebesar Rp. 2.400.000. Penentuan harga dari pembebasan lahan sendiri tidak bisa dilakukan secara spekulatif, sehingga penentuan ini tetap dilakukan dengan berdasar pada NJOP yang ditentukan oleh pemerintah. Hanya saja, masyarakat menginginkan jika harga beli tanah di luar seharga satu bata, maka pemerintah tidak boleh membeli tanah mereka dengan harga setengah bata, hal tersebut tidak masuk pada konsep kesejahteraan bagi masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan. Alasan-alasan inilah yang menjadi faktor pendorong pembangunan “rumah hantu” di Desa Sukamulya. “rumah hantu” dibangun untuk mendapatkan keuntungan dari adanya pembebasan lahan, dan pembangunan “rumah hantu” dilakukan oleh pihak yang pro terhadap pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Ada beberapa kendala yang dihadapi ketika pembebasan lahan adalah mengenai UGR yang tidak transparan dan tidak adanya relokasi sehingga menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan sudut pandang terhadap pembangunan mega proyek BIJB. Kendala kedua adalah masalah “rumah hantu”. Masyarakat yang pro terhadap pembangunan bandara membangun “rumah hantu” untuk bisa mendapat keuntungan dari adanya pembangunan, sedangkan hal tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak kontra sebagai suatu kecurangan. Pihak pro dan kontra terbentuk sepanjang proses pembebasan lahan. Kendala ketiga yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat menjadikan pencairan UGR yang seharusnya diterima oleh masyarakat di Tahun 2017 menjadi tersendat, kemudian pencairan UGR dipindahkan pada Bulan Februari dan Maret di Tahun 2018.

Di tahun 2017, sekitar 1000 kepala keluarga masih terbelit sengketa dengan pemerintah daerah terkait dana pembebasan lahan. Warga Desa Sukamulya hampir seluruhnya berprofesi menjadi petani, karena itu pada konflik yang terjadi pada bulan November 2016 hampir seluruh petani menolak pembebasan lahan. Menurut warga Desa Sukamulya, pengukuran dan pengurusan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan perusahaan telah menggunakan cara-

cara yang represif dengan melibatkan kekuatan penuh aparat keamanan yang berujung pada kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh warga Desa Sukamulya.

Konflik yang terjadi di Desa Sukamulya disebabkan karena adanya pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan adanya alih fungsi lahan. Marx (Bernard, 2007, hlm. 73) mengemukakan “konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antar bagian dari masyarakat yang bertujuan untuk memperebutkan aset-aset bernilai. konflik sosial ini bisa terjadi dalam berbagai aspek seperti konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan bahkan konflik antar bangsa.” Masyarakat Desa Sukamulya bersikukuh dalam hal mempertahankan wilayahnya untuk tidak dipakai dalam pembangunan bandara, akan tetapi pemerintah juga memiliki kekhususan dalam memakai wilayah Desa Sukamulya.

Konflik di Desa Sukamulya mencakup pada pertentangan antara dua kelompok yang berbeda pandangan. Konflik ini didasari karena adanya keinginan berbeda dari setiap segmen masyarakat, yang terlibat di sini adalah antara warga setempat dengan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan bandara. Konflik di desa Sukamulya ini mencakup dua aspek, yaitu konflik vertikal di mana adanya pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan konflik horizontal antar masyarakat yang pro dengan pembangunan dan kontra dengan adanya pembangunan.

Masyarakat Desa Sukamulya menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak meminta izin terlebih dahulu pada masyarakat tentang adanya alih fungsi lahan yang akan dipakai untuk pembangunan bandara, pemerintah setempat langsung menyetujui adanya pembangunan bandara sehingga hal ini menjadikan masyarakat desa sukamulya tidak menerima lahan yang dimilikinya tiba-tiba harus dijual kepada pihak bandara. Konflik yang terjadi di Desa Sukamulya bukan hanya sebatas demonstrasi seperti menandatangani surat petisi, aksi unjuk rasa kepada pemerintah setempat, atau tetap menempati tempat tinggal meskipun sudah ada pemberitahuan bahwa akan terjadinya pembebasan lahan. Konflik di sini sudah menuju pada kekerasan fisik yang dibuktikan dengan adanya bentrokan

antara warga setempat dengan polisi pada saat pemerintah setempat akan mengukur tanah. Pertikaian ini diakhiri karena polisi melemparkan gas air mata untuk memukul mundur masyarakat, menurut informasi yang didapatkan dari masyarakat, sedikitnya ada beberapa masyarakat yang mengalami luka-luka dan ada lima orang yang dianggap sebagai provokator dari penyerangan ini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Turner (Bernard, 2007, hlm. 81) mengenai konflik sebagai “suatu proses dari berbagai peristiwa yang mengarah kepada suatu interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih.”

Karl Marx menjelaskan beberapa pandangannya mengenai suatu kehidupan sosial di mana masyarakat sebagai arena berbagai bentuk pertentangan, Negara dipandang sebagai pihak yang memiliki keterlibatan aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan, ketidaksetaraan hak dan kesempatan, Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan mereka. Maka dari itu, konflik merupakan hal yang wajar terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Konflik-konflik agraria tidak hanya terjadi di desa sukamulya saja, sehingga dengan hal ini mendukung fakta bahwa adanya kesenjangan antara harapan yang digagas pemerintah tentang kesejahteraan masyarakat dengan kenyataan yang memperlihatkan bahwa ada beberapa elemen terkait yang merasakan kerugian dari kehilangan lahan pertanian sebagai sarana mata pencaharian dan juga pemukiman. Hal-hal ini yang mendasari timbulnya konflik di desa sukamulya. Meskipun menurut Marx bahwa konflik merupakan hal yang wajar, akan tetapi harus tetap ada penyelesaian. Adanya kelompok yang dirugikan menjadikan penelitian ini memfokuskan kepada sebuah upaya penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang dilakukan tidak boleh merugikan kedua belah pihak, sehingga harapan dari adanya pembangunan bisa terealisasi dengan baik.

Pembahasan resolusi konflik dalam penelitian yang menyangkut pada masyarakat pedesaan ini lebih merujuk pada upaya menemukan resolusi konflik bukan penyelesaian konflik dengan pendekatan manajemen atau pengaturan konflik berdasarkan kewenangan yang umumnya didasarkan pada aktivitas mediasi dan negosiasi. Oleh karena dua pendekatan yang disebut terakhir hanya

akan berjalan jika pihak-pihak yang berkonflik setuju untuk bernegosiasi dan mempunyai posisi tawar yang sama. Padahal, hal tersebut sering tidak dipunyai masyarakat, khususnya mereka yang ada di pedesaan. Dengan demikian, hal yang penting dilakukan dalam penyelesaian konflik di masyarakat pedesaan adalah melacak konflik untuk menemukan proses perubahan berencana guna mencapai resolusi konflik yang dapat membawa pada penyelesaian konflik sebenarnya. Mengingat bahwa pemerintah sudah melakukan upaya perundingan dari tahun 2014-2016 akan tetapi sampai saat ini belum menemukan solusi sehingga konflik masih terjadi sampai sekarang dan belum terselesaikan.

Oleh sebab itu, peneliti akan menguraikan kejadian yang terjadi di Desa Sukamulya dengan didasari pada permasalahan yang terjadi karena adanya pertentangan dari masyarakat dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Adanya konflik antara masyarakat dan pihak kepolisian menjadikan masalah ini menarik untuk diteliti, hal ini merujuk pada solusi-solusi yang dilakukan pihak yang terlibat dalam pembangunan bandara dan pihak kepolisian mengingat bandara ini tetap terus dibangun sehingga dipastikan adanya penyelesaian konflik yang merujuk pada kesepakatan dari masyarakat untuk mau lahannya mengalami pembebasan. Penelitian ini mengambil tema konflik yang terjadi karena adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan dengan menarik judul: **Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: “Bagaimana Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat?”

Supaya penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana gambaran konflik yang terjadi dalam proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)?



2. Bagaimana strategi dan pendekatan yang dilakukan dalam upaya menciptakan resolusi konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya?
3. Bagaimana hasil dan penerapan dari resolusi konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamulya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai resolusi konflik pembebasan lahan pembangunan bandara internasional jawa barat. Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi mengenai gambaran konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya.
2. Menganalisis strategi serta pendekatan yang dilakukan dalam upaya menciptakan resolusi konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya.
3. Menelaah hasil dan juga penerapan resolusi konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamulya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu, khususnya ilmu sosiologi yang terkait konsep dan teori resolusi konflik dan perubahan sosial serta sosiologi pembangunan.

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konflik yang terjadi diberbagai daerah dengan cara penyelesaiannya dan bermanfaat bagi beberapa kalangan sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya yaitu sebagai informasi yang bisa memberikan gambaran dan pemetaan permasalahan mengenai konflik pembebasan lahan yang terjadi di Desa Sukamulya serta resolusi konflik yang diterapkan, dengan demikian peneliti selanjutnya mengetahui batas-batas terkait permasalahan yang akan dikaji di penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Pemerintah daerah yaitu sebagai sarana informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah mengenai konflik yang terjadi di Desa Sukamulya dan resolusi konflik yang digunakan dalam penyelesaiannya.
3. Masyarakat, sebagai media informasi mengenai ilmu-ilmu Sosiologi yang membahasa mengenai konflik yang terjadi diberbagai daerah sehingga bisa menjadi sebuah informasi, serta untuk memberikan gambaran dalam menindaklanjuti masalah konflik yang sama nantinya.

### **1.5. Struktur Organisasi Tesis**

Supaya tesis ini dapat mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka tesis ini disajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan. BAB I berisi mengenai pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. BAB II berisi kajian pustaka yang pada bab ini diuraikan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dngan bidang yang diteliti, serta posisi teoretis peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian. BAB III mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sehingga pada bab ini peneliti menjelaskan tentang subjek dan lokasi penelitian, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan intrumen, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai konflik pada masyarakat Desa Sukamulya. BAB IV merupakan bagian dari temuan dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pembebasan lahan yang terjadi karena adanya pembangunan bandara di Desa Sukamulya. BAB V berisi mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bab ini penulis berusaha memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam tesis.